

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur *plagiasi*. Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun :

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian ini seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widodo (2010), variabel yang digunakan antara lain tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dan indeks pembangunan masyarakat (IPM) . Hasilnya indikator IPM menunjukkan kecenderungan peningkatan, di mana capaian IPM rata-rata untuk 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 meningkat sebesar 0,67 persen jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2007. Peningkatan kualitas pembangunan manusia tersebut diikuti dengan indikator kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan yang menurun. Di mana, persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008, turun sebesar 7,05 persen menjadi 18,99 persen jika dibandingkan tahun 2007.

Penelitian yang dilakukan Sodik (2007) melakukan pendekatan perbandingan perekonomian dengan metode panel antar provinsi yang ada di Indonesia, dan hasilnya selama periode penelitian ditemukan bahwa variabel investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sementara itu variabel keterbukaan ekonomi memiliki hubungan yang konsisten dengan teori tetapi tidak signifikan. Variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda negatif untuk tahun 1993-2003 dan tahun 1998-2000

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wibowo (2014) melibatkan beberapa variabel seperti Tingkat kemiskinan serta beberapa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Beberapa sektor tersebut mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam jangka panjang. Penelitian ini hampir memiliki kesamaan dengan yang penulis lakukan, hanya saja perbedaannya ada pada variabel dependen penelitian milik Erhan yaitu tingkat kemiskinan, sedangkan dalam penelitian ini tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kemudian menurut penelitian yang diteliti oleh Estache pada tahun 2007 mengemukakan tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dalam lingkup negara serta dalam lingkup yang lebih kecil pada negara-negara kaya atau dapat dikatakan negara maju. Data yang digunakan adalah periode tahun 1981-200 di 26 daerah di Swiss. Hasilnya pengeluaran pemerintah lokal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat penelitian dilakukan di pemerintahan yang kaya atau makmur, sehingga pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan di 26 daerah di Swiss yang diteliti.

Sementara itu Martha Pascual dan Santiago (2006) juga melakukan penelitian perihal pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah serta bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 15 negara di Eropa. Dalam periode selama tahun 1994 hingga tahun 2000. Kesimpulan pada penelitian ini adalah hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari Negara yang menjadi sample penelitian. Untuk Negara-negara maju seperti di Eropa terdapat hubungan yang positif. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan regresi dan teknik panel.

Yang terakhir penelitian yang dijadikan rujukan merupakan penelitian Sulaeman Abu-Daber (2008) yang meneliti pengeluaran pemerintah pada sektor militer dengan pertumbuhan ekonomi. Negara yang diteliti merupakan negara timur tengah yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap perang dan militer. Negara tersebut adalah Mesir, Israel dan Suriah dengan periode akhir tahun 1998. Hasil pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengeluaran di sektor militer berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran sipil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara Israel dan Mesir.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel yang digunakan. Penulis pada penelitian ini mencoba mengkombinasikan variabel-variabel yang sebelumnya digunakan. Perbedaan penelitian ini terhadap beberapa penelitian sebelumnya antara lain periode tahun yang diambil sebagai waktu penelitian, juga variabel dependen.

Adapun rangkuman beberapa penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel berikut ini untuk mempermudah dalam memahami dan membandingkan dengan penelitian penelitian terdahulu:



Tabel 2.1  
Telaah Pustaka

No	Penulis	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Antonio Estache	2007	Growth Effects of Public Expenditure on the State and Local Level: Evidence From a Sample of Rich Government	Dengan menggunakan regresi linear berbasis panel data. Data yang digunakan 1981-2000 pada 26 daerah di Swiss.	Hubungan negatif yang kuat antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.
2	Suleiman Abu- Daber dan Aamer S	2003	Government Expenditure, Military Spending and Economic Growth : Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria	Menggunakan Standard Granger Causality dan Error Correction Model(ECM). Data yang digunakan adalah Mesir (1975-1998),Israel (1967-1998) dan Syria (1973-1998)	Pengeluaran militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran sipil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Israel dan Mesir
3	Marta Pascual dan Santiago	2006	Government Spending and economic growth in the European union Countries	Model regresi menggunakan panel data 15 Negara- Negara Eropa tahun 1994-2000	Hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari Negara yang menjadi sample penelitian.
4	Ari Widodo	2010	Analisis Pengaruh Sektor Publik di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia	analisis IPM dalam kaitannya dengan hubungan antar pengeluaran sektor publik terhadap kemiskinan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	IPM berperan sebagai variabel pure moderating dan juga sebagai variabel intervening dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor publik tidak berpengaruh langsung terhadap IPM maupun kemiskinan.
5	Jamzani Sodik	2007	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia	GLS (General least Square) panel data periode 1993-2003 26 propinsi di Indonesia	Variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda negatif untuk tahun 1993-2003 dan tahun 1998-2000
6	Mohamad Erhan Wibowo	2014	Analisis pengeruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan (studi kasus di kabupaten/kota di jawa tengah)	Tingkat kemiskinan serta beberapa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan.	Beberapa sektor tersebut mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam jangka panjang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya dihitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Berbeda pengertiannya dengan pembangunan ekonomi yang memiliki pengertian pertumbuhan ekonomi yang lebih luas baik dari segi struktur output, input, perubahan dalam teknik produksi, sikap dan perilaku sosial serta kerangka kelembagaan menuju kepada keadaan dan taraf hidup yang secara menyeluruh lebih baik. Dengan demikian jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi.

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Todaro,2006:127) mengemukakan hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Musgrave (1989:120) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial.

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi infrastruktur ekonomi dan sosial. Contohnya adalah pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya, yang kesemuanya itu mutlak dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.  
  
Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Pendidikan formal, program pendidikan dan pelatihan kerja perlu lebih diefektifkan untuk mencetak tenaga-tenaga terdidik dan sumber daya manusia yang terampil.  
  
Logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia (*human capital*) dapat dianalogikan dengan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya tanah melalui investasi strategis.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan

menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

3. Kemajuan teknologi, terdapat tiga klasifikasi yaitu:

- 1) Kemajuan teknologi yang bersifat netral
- 2) Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja
- 3) Kemajuan teknologi yang hemat modal

## **2. Peran dan Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian**

Pemerintah memiliki peran dalam kehidupan bernegara yang dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kelompok peran (Dumairy, 1999) yaitu :

1. Peranan alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada, agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peraturan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien.  
  
Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya. Keterlibatan peran dan pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, karena pemerintah bertindak pula sebagai pelopor dan pengendali pembangunan.
2. Peranan distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.

Pemilikan sumber daya , kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi di setiap negeri acap kali tidak setara, baik di antara wilayah-wilayah negara yang bersangkutan maupun diantara sektor-sektor ekonomi. Begitu pula dengan kecenderungan pembagian hasil-hasilnya. Kesenjangan pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan cenderung mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaan ekonomi di tangan segelintir pihak tertentu.

Daya tawar (*bargaining position*) antar pelaku ekonomi menjadi tidak seimbang. Disisi lain ketidakseimbangan daya tawar dapat melemahkan pasar. Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan secara adil dan proporsional. Dengan pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya.

3. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *disequilibrium*. Peranan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul. Namun kadang kala ketidakberdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah, dalam arti pemerintah secara apriori berpandangan pihak swasta tidak mampu mengatasi masalahnya.

4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh , berkembang dan maju. Peran ini diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Argumentasi pemerintah bahwa ia harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekan sendiri. Karena dialah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka ia merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya : atas dasar itu ia merasa berhak melakukan apa saja yang menurutnya pantas ditempuh demi pembangunan.

### **3. Teori Pengeluaran Pemerintah**

#### **a. Kebijakan Fiskal**

Menurut McEachern (2000:146) kebijakan fiskal menggunakan belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak dan pinjaman dapat mempengaruhi variabel makro ekonomi seperti tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat kebijakan fiskal dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu kebijakan fiskal stabilisator dan diskrit. Kebijakan fiskal penstabil otomatis/ atau disebut juga stabilisator terpasang, menurut Lipsey (1990:56) berbagai kebijakan yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi angka multiplier. Penstabil otomatis mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan-perubahan outonomous pada pengeluaran-pengeluaran seperti investasi. Selain itu, perangkat ini akan bekerja tanpa pemerintah harus bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap perubahan pendapatan nasional pada waktu perubahan ini terjadi. Tiga bentuk

penstabil otomatis yang utama adalah sebagai berikut :

1. Pajak Pajak langsung akan mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan diseperti yang terkait dengan setiap fluktuasi pendapatan nasional tertentu. Dengan demikian, pada kecenderungan mengkonsumsi marginal tertentu dari pendapatan diseperti, pajak langsung mengurangi tingkat kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional.
2. Pengeluaran pemerintah Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklis. Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, makin kecil kadar ketidak-stabilan siklis pada seluruh pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat saja merugikan atau menguntungkan. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah merupakan penstabil otomatis yang ampuh dalam perekonomian
3. Transfer pemerintah, transfer pemerintah contohnya berupa jaminan sosial, jaminan kesejahteraan dan kebijakan bantuan pertanian. Pembayaran transfer yang berperan sebagai stabilisator terpasang cenderung menstabilkan pengeluaran untuk konsumsi, dalam upaya menghadapi fluktuasi pendapatan nasional.

Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal diskresioner, yaitu memberlakukan perubahan pajak dan pengeluaran yang dirancang untuk mengimbangi senjang yang timbul. Agar dapat melakukannya secara efektif, pemerintah secara periodik harus mengambil keputusan untuk merubah kebijakan fiskal. Dalam proses mempertimbangkan kebijakan fiskal diskresioner, perlu dipertimbangkan dua hal, yaitu kemudahan kebijakan fiskal untuk dirubah dan pandangan rumah tangga dan perusahaan atas kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat sementara atau jangka panjang.

Stabilitas perekonomian dapat dicapai apabila pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Artinya pemerintah hanya mampu memelihara angkatan kerja tinggi (pengangguran rendah), tingkat harga yang stabil, tingkat suku bunga yang wajar, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Jika perekonomian stabil maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan pengangguran menurun sehingga tercipta kesejahteraan sesuai dengan harapan masyarakat (Soediyono,1992:92)

#### **b. Pengeluaran pemerintah secara mikro**

Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar (Nicholson,2002:225). Menurut Guritno (1997:181) secara mikro ekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor mengenai barang publik. Faktor-faktor permintaan akan barang publik dan faktor-faktor persediaan barang publik akan berinteraksi dengan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi

pengeluaran untuk barang lain.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik
2. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
3. Perubahan kualitas barang publik
4. Perubahan harga faktor-faktor produksi

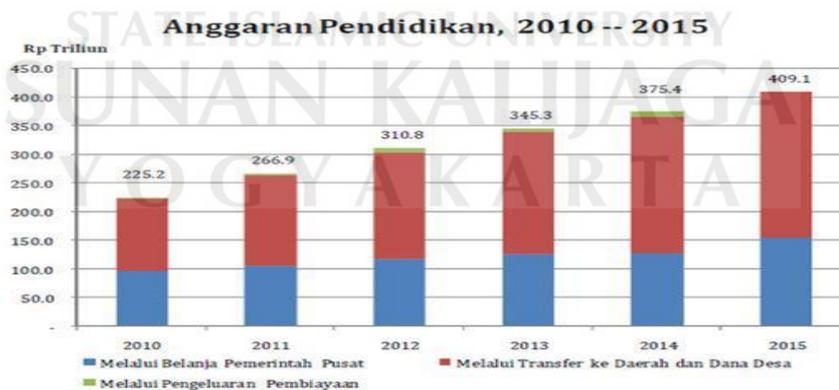
#### **4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan**

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan

disuatu wilayah. Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan, maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Gambar 2.1



Sumber: *kpk.go.id*

Implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara

umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup / investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

### **5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan**

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita.

Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor

kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

## **6. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Infrastruktur**

Infrastruktur tidak kalah pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Friawan (2008) menjelaskan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi, seperti hasil studi The World bank (2004) yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam beberapa tahun terakhir pasca krisis ekonomi 1998 salah satunya dipengaruhi rendahnya tingkat investasi. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat menjamin bahwa

akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia.

Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah sektoral dan lintas sektoral. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani sektor-sektor terkait. Seperti dari sisi pembiayaan pemerintah diharapkan mampu membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan mengembangkan metodologi yang dapat secara mudah diterapkan. Di saat bersamaan, mengingat mobilisasi investasi dari sektor swasta membutuhkan waktu, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian pada peningkatan investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi, salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur. Namun jika pengeluaran pemerintah saja tidak cukup diperlukan peran pihak swasta.

Peran pemerintah untuk meningkatkan perhatian pihak swasta adalah dengan bantuan pembebasan lahan, subsidi operasional dan modal, dan jaminan usaha. Peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti dengan efektifitas dan efisiensi dari pengeluaran tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan agar terciptanya transparansi dalam proses pengadaan barang, dan pembangunan.

## **7. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh

unit ekonomi. PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Nasution (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, PMA dan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sedangkan, variabel PAD, DAU, DBH, Pengeluaran pemerintah daerah dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Vidyattama (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia, antara lain investasi, modal manusia (*human capital*), populasi, belanja pemerintah daerah, infrastruktur dan perdagangan terbuka (*openness trade*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan populasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Indonesia. Belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB di Indonesia, sedangkan modal manusia infrastruktur dan perdagangan terbuka berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB di Indonesia.

Widodo (2006:5), menyatakan bahwa indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah

tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar.

Menurut Sukirno (2000:423), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga, dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Prishardoyo (2008:2) menyatakan tingkat perkembangan PDRB sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Sukirno (1981:23) menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pemaparan diatas perihal produk domestik regional bruto (PDRB) maka penulis mengambil PDRB sebagai tolak ukur pertumbuhan perekonomian di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Karena PDRB memiliki pengaruh

yang sangat relefan dengan tingat pertumbuha ekonomi pada masyarakat.

### **8. Anggaran Dana Pemerintah dalam Prespektif Islam**

Pada dasarnya dalam agama Islam telah diajarkan dan memberi pedoman kepada setiap manusia untuk bertindak dan melakukan sesuatu, termasuk juga bagaimana pemerintah dalam haknya untuk mengatur pengeluaran yang akan dilakukan, mengingat dana tersebut merupakan milik masyarakat yang diberikan melalui pungutan pajak. Sehingga pemerintah dalam hal ini harus mampu mengolah dan menganggarkan dana masyarakat tersebut dengan bijak dan benar. Kemudian hukum yang menganjurkan agar pendistribusian pendapatan sama rata (Q.S. An-Nahl 16:71),

مَا عَلَىٰ رِزْقِهِمْ لِأَدَىٰ فَضَّلُوا الَّذِينَ فَمَا الرِّزْقِ فِي بَعْضِ عَلَىٰ بَعْضِكُمْ فَضَّلَ وَاللَّهُ  
يَجْحَدُونَ اللَّهَ أَفَبِنِعْمَةِ □ وَأَعْسَدَ فِيهِ فُهُمْ أَيَّمَانُهُمْ مَلَكَتْ

Tafsir Ibnu Katsir Surah An-Nahl ayat 71, Allah Ta'ala menjelaskan kepada orang-orang musyrik mengenai kebodohan dan kekufuran mereka, dimana mereka menganggap Allah mempunyai sekutu-sekutu, padahal mereka mengakui bahwa sekutu-sekutu itu adalah hamba-Nya juga, sebagaimana yang mereka ucapkan dalam talbiyah pada saat ibadah haji:”kami memenuhi seruan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu kecuali seorang sekutu. Engkau menguasai sekutu itu dan apa yang dimilikinya.

Kemudian Allah Ta'ala berfirman mengingkari mereka,”kalian tidak sudi berbagi dengan hamba sahaya kalian dalam hal kepemilikan rizki yang telah kami berikan”. Lalu bagaimana Allah Ta'ala rela disamakan dengan hamba-Nya dalam hal ilahiyyah dan pengagungan. Sebagaimana yang dia firmankan dalam ayat yang lain yang artinya: “Dia membuat perumpamaan untukmu dari dirimu sendiri.

Apakah ada diantara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rizki yang telah kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak menggunakan) rizki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? “dan ayat seterusnya. (Q.S. Ar-Ruum 28).

Al-Aufi bercerita dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, dia berkata:”Mereka tidak menyekutukan hamba sahaya mereka dalam pengurusan harta benda dan istri-istri mereka, lalu bagaimana mungkin mereka akan menyekutukan hamba-Ku dalam kekuasaan-Ku ? Demikianlah firman-Nya, maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” Firman-Nya: *afa bini’matillaahi yajhaduun* (“Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”) Maksudnya, mereka memperuntukan satu bagian dari tanaman dan binatang ternak untuk Allah, lalu mereka mengingkari nikmat-Nya dan menyekutukan pihak lain dengan-Nya.

Dari al-Hasan al-Bashri, dia bercerita, “Umar bin al-Khaththab pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy’ari:”Merasa puaslah dengan rizki dunia ini yang kamu miliki, karena sesungguhnya ar-Rahmaan (Yang Mahapengasih) telah mengutamakan sebagian hamba-Nya atas sebagian lainnya dalam hal rizki sebagai upaya menguji masing-masing dari mereka. Orang yang diberikan kelapangan (akan) diuji, bagaimana dia bersyukur kepada Allah dan menunaikan hak yang telah diwajibkan kepadanya atas rizki yang dikaruniakan kepadanya.” (HR. Ibnu Abi Hatim). (Abdullah Bin Muhammad, 2003:Juz 14, 82-84).

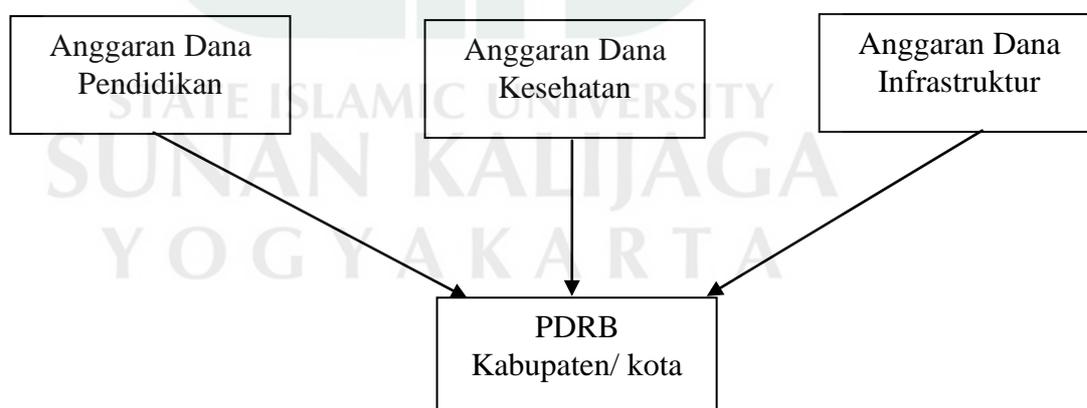
Ayat di atas menjelaskan tidak adanya harta yang lebih-lebihkan akan tetapi semua pendistribusian merata dalam konteks anggaran negara. Ayat tersebut memberikan pesan moral untuk menjalani pemerintahan antar pusat dan daerah

secara sistematis dan transparan. Pemerintah memiliki hak untuk memberikan seberapa banyaknya dana yang diberikan selama masih dalam koridor wajar, pemerintah juga memberikan anggaran sesuai berapa yang dibutuhkan daerah tersebut, karena tiap daerah memiliki kebutuhannya masing masing dan berbeda-beda

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian telaah pustaka, rumusan masalah dan landasan teori, untuk menganalisa pengaruh alokasi dana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, maka variabel-variabel yang digunakan untuk dapat memberi pandangan dalam pemikiran penelitian adalah Dana Pendidikan, Dana Kesehatan, Dana Infrastruktur sebagai variabel Independen, sementara variabel Dependennya adalah Pertumbuhan ekonomi, atau dalam hal ini PDRB tiap kabupaten dan kota. Keterkaitan antar variabel tersebut akan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2



#### 1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara, tentang adanya suatu hubungan tertentu antara variabel-variabel yang digunakan, yang

diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini. Maka hipotesis untuk penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:

a. **Hubungan Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maemunah (2006), Sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat masih terjadi *flypaper effect*. Hasil yang didapat adalah bahwa untuk belanja bidang pendidikan tidak terjadi *flypaper effect*, karena tidak terjadi belanja daerah yang lebih besar terhadap transfer dari pada pendapatan kabupaten dan kota. Sedangkan untuk belanja bidang kesehatan dan belanja bidang pekerjaan umum telah terjadi *flypaper effect*.

Penelitian yang dilakukan oleh Maddison (1991) memperlihatkan PDB per kapita pada tahun 1913 dengan tingkat masuk sekolah dari pendidikan dasar pada tahun 1882 di negara Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil dan Korea Selatan, terlihat bahwa tingginya tingkat PDB per kapita dari negara yang diteliti memiliki hubungan dengan tingginya tingkat masuk sekolah dari pendidikan dasar pada 30 tahun terakhir. Karena kedua faktor tersebut baik tingkat pendidikan dan tingkat PDB per kapita pada suatu periode tertentu memiliki hubungan yang dekat antara tingkat pendidikan tahun sebelumnya dan PDB perkapita tahun sesudahnya. Dari beberapa penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha1: Variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi**

**kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2011-2013.**

**B. Hubungan Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

Menurut Rimawati (2004:3), Selama ini dimensi ekonomi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan masih jarang atau sedikit mendapatkan perhatian. Perubahan mendasar terjadi selama dua dekade terakhir, yaitu ketika sektor kesehatan menghadapi kenyataan bahwa sumber daya yang tersedia (khususnya dana) jumlahnya semakin jauh dari mencukupi. Sementara itu Juanita (2002:2) menyatakan salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik.

Di dalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan pernyataan dan penelitian yang ada, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha2: Variabel pengeluaran pemerintah atas kesehatan berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2011–2013.**

c. **Hubungan Pengeluaran Pemerintah Atas Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

Menurut Teori pertumbuhan Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan persediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang di peroleh dari Mazhab Klasik yang menyatakan bahwa perekonomian berada pada kondisi *full employment* sehingga faktor-faktor produksi sudah digunakan secara penuh. Penambahan output menurut Kaum Klasik hanya akan terjadi apabila ada penambahan dari faktor-faktor produksi tersebut (Sukirno, 2004:33). Sedangkan Mankiw (2004:42) menyatakan pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik. Hal serupa juga dijelaskan dalam Todaro (2006:116) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur disuatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Dari hasil penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha3: Variabel pengeluaran pemerintah atas infrastruktur berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah periode tahun 2011–2013.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Berdasarkan sifat data, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang menggunakan data-data berupa angka yang pasti. Data diperoleh dari berbagai sumber yang berwenang dalam menerbitkan data-data tersebut seperti Badan Pusat Statistik, dan Departemen keuangan lalu diolah dengan menggunakan alat analisis model data panel sehingga menghasilkan informasi yang ditujui dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diolah dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data PDRB Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, dan data lainnya diperoleh dari kementrian keuangan berupa anggaran pemerintah di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, juga literatur lainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi. Data yang digunakan antara lain adalah anggaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam jangka tahun 2010-2013. Selain itu data yang digunakan adalah data kurun waktu (*time series*) dari tahun 2010-2013 dan data deret lintang (*cross section*) sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2010:144). Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh data tentang seluruh anggaran pemerintah dalam beberapa sektor yang telah dibagi menurut kebutuhannya masing-masing sesuai kebijakan otonomi daerah yang tercatat di departemen keuangan Republik Indonesia

Sampel merupakan sebagian dari elemen-elemen populasi (Indrianto dan Supomo, 2011:115). Sampel dapat diidentifikasi sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2010:95). Menurut Sugiyono (2001:61) sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang diperoleh melalui departemen keuangan dan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam rentang tahun 2010-2013.

### **D. Variabel Penelitian**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam analisis ini adalah dana pendidikan ( $X_1$ ), dana kesehatan ( $X_2$ ), dan

dana infrastruktur ( $X_3$ ). Sedangkan variabel dependen dalam analisis ini adalah PDRB sebagai ( $Y$ ).

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode sekunder, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik dan Departemen keuangan Republik Indonesia, buku referensi, maupun jurnal-jurnal ekonomi. Data yang digunakan adalah data *time series* adalah data runtut waktu (*time series*) yang merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara beruntutan dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya adalah : pertama, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data anggaran dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data tersebut merupakan data sekunder yakni data yang diperoleh ataupun telah diolah pihak lain yaitu instansi/lembaga. Kedua, metode kepustakaan atau literatur digunakan untuk mempermudah dan melancarkan penyusunan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, departemen keuangan, data-data yang diperoleh dari internet, buku-buku, maupun literatur yang dapat mendukung.

### **F. Metode Analisis Data**

Dalam ilmu ekonomi ketergantungan suatu variabel (variabel terikat) terhadap variabel lain (variabel bebas) tidak hanya bersifat seketika. Seberapa

sering suatu variabel bereaksi terhadap variabel lain dengan suatu selang waktu atau “lag”. Model penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan model panel data. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

dimana N adalah banyaknya data *cross section*.

Sedangkan persamaan model *time series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana T adalah banyaknya data *time series*

Oleh karena data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*, maka persamaanya menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it}$$

$$i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana:

N : banyaknya observasi

T : banyaknya waktu

N x T : banyaknya data panel

Pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan.

Berikut adalah keunggulan metode data panel seperti yang disebutkan oleh Wibisono (dikutip oleh Shochrul dkk, 2011:73):

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.

2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat bebas (*degrees of freedom-df*), sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel. Ada tiga metode yang bisa digunakan untuk bekerja dengan data panel, sebagai berikut (Gujarati, 2003:637):

1. Pooled least square (PLS).

Mengestimasi data panel dengan metode OLS. Pendekatan PLS secara sederhana menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section*. Model data panel untuk PLS adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it}$$

## 2. Fixed effect (FE)

Pendekatan FE memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted-variables*, yang mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*. Model dengan FE menambahkan variabel *dummy* untuk mengizinkan adanya perubahan intersep ini. Model data panel untuk FE adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_{it}$$

## 3. Random effect (RE).

Pendekatan RE memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan error dari *cross section* dan *time series*. Model RE adalah variasi dari estimasi *generalized least square (GLS)*. Model data panel untuk RE adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \epsilon_{it} + u_{it}$$

## 1. Pengujian Hipotesis

### a. Uji T

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol, atau:

$$H_0: \beta_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a: \beta_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan variabel yang signifikan terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2005:105).

Pengujian Hipotesis:

- Jika nilai t-hitung < t-tabel, maka  $H_0$  diterima,
- Jika nilai t-hitung > t-tabel, maka  $H_0$  ditolak.

### **b. Uji F**

Dalam Gujarati (2003:696), uji Fisher (uji F) merupakan alat uji statistik secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Dari uji F dapat diketahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau tidak terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-hitung dengan F-tabel, dimana nilai F-hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

F hitung =

dimana:

$R^2$  = koefisien determinasi

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel penjelas termasuk konstanta

Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau:  $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_i = 0$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau  $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_i \neq 0$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis:

- Jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima,
- Jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi (*Goodness of Fit*) dinotasikan dengan *R-squares* yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai Koefisien Determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 0, artinya variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sama sekali. Sementara bila nilai Koefisien Determinasi sama dengan 1, artinya variasi variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh *R-square*-nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5 40' dan 8 30' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah provinsi Jawa Tengah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

Propinsi Jawa Tengah adalah salah satu propinsi yang terletak di pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 3,25 juta hektar. Luas tersebut sekitar 25 persen dari total luas pulau Jawa dan 1,7 persen dari luas wilayah Indonesia. Propinsi Jawa Tengah sebelah Barat berbatasan dengan propinsi Jawa Barat, sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia serta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Propinsi Jawa Tengah beribukota di Semarang dan terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah itu merupakan jumlah terbanyak kedua setelah propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Angka Sementara Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2011 tercatat sebesar 32,64 juta jiwa atau sekitar 13,54 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin

(rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan).

## B. Analisis Deskriptif

### 1. Gambaran PDRB

Perkembangan ekonomi provinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan melalui nilai PDRB dari tahun ke tahun. PDRB menggambarkan produktivitas dari suatu daerah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada tabel 4.1 ditunjukkan besarnya PDRB provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2004 sampai tahun 2008.

Tabel 4.1

PDRB Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2008

No	Tahun	PDRB menurut harga konstan tahun 2000 (dalam jutaan rupiah)	PDRB harga berlaku (dalam jutaan rupiah)
1.	2004	118.574.724,49	162.812.312,01
2.	2005	123.765.649,17	190.060.931,23
3.	2006	129.111.684,55	216.718.457,34
4.	2007	135.317.845,14	243.664.629,56
5.	2008	141.116.605,91	278.679.839,80

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2005-2009

Pada periode tersebut, porsi terbesar PDRB propinsi Jawa Tengah disumbangkan oleh tiga daerah yaitu kota Semarang, kabupaten Cilacap dan kabupaten Kudus. Kota Semarang rata-rata menyumbang sekitar 17 persen total PDRB, kabupaten Cilacap menyumbang sebesar 8 persen dan kabupaten Kudus menyumbang 8 persen dari total PDRB propinsi Jawa Tengah. Kota Semarang adalah ibukota propinsi yang dominan dengan perdagangan dan jasa-jasa. Kabupaten Kudus terkenal dengan industri rokok yang menjadi sektor dominan.

Kabupaten Cilacap dominan dengan sektor perdagangannya. Dengan demikian, sekitar 33 persen PDRB propinsi Jawa Tengah disumbangkan oleh ketiga daerah tersebut. Perkembangan PDRB harga konstan tahun 2000 periode 2004-2008.

Dilihat dari sektor perekonomian dengan klasifikasi sembilan sektor, ada tiga sektor yang mempunyai porsi terbesar dalam PDRB Jawa Tengah, yaitu sektor industri manufaktur, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. Rata-rata porsi sektor industri manufaktur terhadap PDRB pada periode tahun 2004-2008 adalah 32,9 persen. Sektor pertanian menyumbang sekitar 19,8 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sekitar 19,8 persen. Ketiga sektor tersebut menyumbang sekitar 72,6 persen dari total PDRB Jawa Tengah.

Tabel 4.2

## Kontribusi PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2004-2008

No.	Sektor	2004	2005	2006	2007	2008
1.	Pertanian	19,90	19,11	20,34	20,43	19,60
2.	Pertambangan & Galian	0,96	0,97	1,02	1,00	0,97
3.	Industri Pengolahan	32,64	33,71	32,85	32,14	33,08
4.	Listrik, gas dan air bersih	1,22	1,20	1,12	1,09	1,03
5.	Bangunan	5,63	5,77	5,66	5,80	5,84
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	20,09	19,92	19,63	19,93	19,73
7.	Pengangkutan dan komunikasi	5,67	5,91	5,96	5,88	6,03
8.	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	3,73	3,56	3,40	3,46	3,48
9.	Jasa-jasa	10,16	9,85	10,02	10,27	10,25

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 (diolah kembali)

PDRB menunjukkan produktivitas dalam kegiatan ekonomi, sedangkan PDRB perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena menunjukkan rata-rata pendapatan tiap orang. Perkembangan PDRB per kapita daerah di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 4.2. Pada tabel tersebut terlihat

perbandingan antara PDRB berdasarkan harga konstan dengan PDRB per kapita dan perbandingan persentase kenaikan masing-masing tiap tahun. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PDRB yang cenderung konstan di angka 4 persen. Sementara itu perkembangan PDRB per kapita lebih fluktuatif, dimana pada tahun 2005 terjadi kenaikan sekitar 2 persen. Kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 6 persen, kemudian tahun 2007 turun menjadi 3 persen dan pada tahun 2008 turun lagi menjadi 2 persen. Perkembangan PDRB per kapita lebih fluktuatif karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada tahun bersangkutan mengingat PDRB perkapita adalah rata-rata PDRB tiap penduduk. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai kenaikan PDRB yang besar pula bisa mengakibatkan penurunan tingkat kenaikan PDRB perkapita atau bahkan penurunan jumlah PDRB perkapita.

Menurut data tentang PDRB dan PDRB perkapita serta dominasi sektoral, daerah-daerah yang mengandalkan sektor-sektor non-pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa-jasa memiliki nilai PDRB dan PDRB perkapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang mengandalkan sektor pertanian. Selain itu daerah kota juga ternyata cenderung memiliki nilai PDRB perkapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten.

### **C. Analisis Regresi Data Panel**

#### **1. Hasil Estimasi *Common Effects Model***

*Common Effects Model* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data *cross section* dan *time series* sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu).

Tabel 4.3  
Hasil Estimasi Common Effects Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.27167	0.299811	97.63391	0.0000
LOG(INF)	0.048749	0.164631	0.296109	0.7678
LOG(KES)	-0.407630	0.186724	-2.183068	0.0313
LOG(PEND)	0.370116	0.119908	3.086662	0.0026
R-squared	0.096695	Mean dependent var	29.86085	
Adjusted R-squared	0.069864	S.D. dependent var	0.688898	
S.E. of regression	0.664398	Akaike info criterion	2.057479	
Sum squared resid	44.58385	Schwarz criterion	2.158582	
Log likelihood	-104.0176	Hannan-Quinn criter.	2.098448	
F-statistic	3.603870	Durbin-Watson stat	0.810037	
Prob(F-statistic)	0.016023			

Sumber : data diolah (lampiran)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu variabel Kesehatan (KES), dan Pendidikan (PEND) memiliki nilai probabilitas (Prob.)  $< 0,05$  (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi atau alpha). Sedangkan Variabel Infrastruktur (INF) memiliki nilai probabilitas (Prob.)  $> 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan hasil estimasi CEM variabel kesehatan dan pendidikan mendapat hasil signifikan sedangkan variabel infrastruktur tidak signifikan.

## 2. Hasil Estimasi *Fixed Effects Model*

Pendekatan model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu

Tabel 4.4  
Hasil Estimasi Fixed Effects Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.10180	0.031438	957.4857	0.0000
LOG(INF)	0.063934	0.022074	2.896207	0.0051
LOG(KES)	-0.050239	0.024529	-2.048150	0.0445
LOG(PEND)	-0.025570	0.013781	-1.855383	0.0679

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.995936	Mean dependent var	29.86085
Adjusted R-squared	0.993692	S.D. dependent var	0.688898
S.E. of regression	0.054714	Akaike info criterion	-2.690866
Sum squared resid	0.200570	Schwarz criterion	-1.738385
Log likelihood	179.6905	Hannan-Quinn criter.	-2.309660
F-statistic	443.7945	Durbin-Watson stat	2.951615
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : data diolah (lampiran)

Dari tabel di atas dapat dipaparkan bahwa variabel independen infrastruktur (INF) dan kesehatan (KES) memiliki nilai probabilitas (Prob.)  $< 0,05$  (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi atau alpha). Sedangkan variabel pendidikan (PEND) memiliki nilai probabilitas (Prob.)  $> 0,05$  jadi dapat diartikan bahwa variabel infrastruktur dan kesehatan signifikan dan berpengaruh positif terhadap variabel PDRB dan variabel pendidikan tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap variabel dependen yaitu PDRB.

### 3. Hasil Estimasi *Random Effects Model*

*Random Effect model* mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*.

Tabel 4.5  
Hasil Estimasi Random Effects Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.09650	0.097380	309.0617	0.0000
LOG(INF)	0.064068	0.022013	2.910407	0.0044
LOG(KES)	-0.052803	0.024464	-2.158366	0.0333
LOG(PEND)	-0.022992	0.013760	-1.670974	0.0978
Effects Specification		S.D.	Rho	
Cross-section random		0.545339	0.9900	
Idiosyncratic random		0.054714	0.0100	
Weighted Statistics				
R-squared	0.617442	Mean dependent var	1.726804	
Adjusted R-squared	0.606079	S.D. dependent var	0.095804	
S.E. of regression	0.060130	Sum squared resid	0.365171	
F-statistic	54.33749	Durbin-Watson stat	1.858409	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.000684	Mean dependent var	29.86085	
Sum squared resid	49.39010	Durbin-Watson stat	0.570895	

Sumber : data diolah (lampiran)

Dari tabel di atas dapat dipaparkan bahwa variabel independen infrastruktur (INF) dan kesehatan (KES) memiliki nilai probabilitas (Prob.)  $< 0,05$  (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi atau alpha). Sedangkan variabel pendidikan (PEND) memiliki nilai probabilitas (Prob.)  $> 0,05$  jadi dapat diartikan bahwa variabel infrastruktur dan kesehatan signifikan dan berpengaruh positif terhadap variabel PDRB dan variabel pendidikan tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu PDRB.

#### 4. PLS vs FEM (Uji Chow)

Uji Chow dilakukan untuk memilih atau membandingkan model mana yang terbaik antara *common effects* dan *fixed effects*. Uji chow menggunakan uji *F-Restricted* dengan cara melihat nilai probabilitas (*P-Value*) F-Statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Sebelumnya terlebih dahulu dibuat hipotesisnya sebagai berikut :

$H_0$  : Model PLS

$H_1$  : Model Fixed Effects

Hasil dari pengujian antara Fixed Effect Model (FEM) dan Pool Least Square (PLS) diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebagai berikut :

Tabel 4.6  
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	436.063221	(34,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	567.416220	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: LOG(PDRB)  
Method: Panel Least Squares  
Date: 02/07/17 Time: 15:30  
Sample: 2011 2013  
Periods included: 3  
Cross-sections included: 35  
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.27167	0.299811	97.63391	0.0000
LOG(INF)	0.048749	0.164631	0.296109	0.7678
LOG(KES)	-0.407630	0.186724	-2.183068	0.0313
LOG(PEND)	0.370116	0.119908	3.086662	0.0026

R-squared	0.096695	Mean dependent var	29.86085
Adjusted R-squared	0.069864	S.D. dependent var	0.688898
S.E. of regression	0.664398	Akaike info criterion	2.057479
Sum squared resid	44.58385	Schwarz criterion	2.158582
Log likelihood	-104.0176	Hannan-Quinn criter.	2.098448
F-statistic	3.603870	Durbin-Watson stat	0.810037
Prob(F-statistic)	0.016023		

Sumber : data diolah (lampiran)

Dari tabel 4.6 diatas diperoleh F-Statistik adalah 436.063221 dengan d.f. (34,67) dan nilai probabilitas F-Statistik sebesar 0.0000, itu artinya nilai F-Statistik lebih kecil dari tingkat signifikansinya  $\alpha$  5% ( $436.063221 < 0.05$ ). Maka  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effects Model (FEM)* lebih tepat bila dibandingkan dengan model *Pool Least Square (PLS)*.

### 5. FEM vs REM (Uji Hausman)

*Hausman Test* dilakukan untuk memilih atau membandingkan model mana yang terbaik antara *Fixed EffectS Model (FEM)* dan *Random Effects Model (REM)*. Uji Hausman memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi-Square Statistic*. Sehingga keputusan pemilihan model dapat ditentukan dengan tepat.

Sebelumnya terlebih dahulu dibuat hipotesisnya sebagai berikut :

$H_0$  : Model Random Effect

$H_1$  : Model Fixed Effect

Hasil dari pengujian *Hausman Test* bisa dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.7  
Hasil Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.984809	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(INF)	0.063934	0.064068	0.000003	0.9348
LOG(KES)	-0.050239	-0.052803	0.000003	0.1491
LOG(PEND)	-0.025570	-0.022992	0.000001	0.0009

Sumber : data diolah (lampiran)

Hasil uji Hausman pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa *Chi-Square Statistic* sebesar 23.984809 dengan nilai probabilitas 0.0000 dan d.f. 3. Dapat dilihat bahwa Chi hitung lebih besar bila dibandingkan Chi tabel dan nilai probabilitas *Chi-Square Statistic* lebih kecil dari nilai  $\alpha$  5% ( $0.0000 < 0.05$ ) maka  $H_0$  ditolak. Dari uji pemilihan model tersebut dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model (FEM)* lebih tepat bila dibandingkan *Random Effect Model (RAM)*. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari uji Chow dan uji Hausman model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model (RAM)*.

#### D. Pengujian Hipotesis

##### 1. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Apabila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Hasil uji F didapatkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 3.603870 pada tingkat keyakinan  $\alpha = 5\%$ ,  $k = 35$  dan  $n = 105$ , sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 0,016023 dengan nilai df yaitu sebesar 34,67. Berdasarkan uji F terlihat bahwa  $F_{hitung} >$

Ftabel, maka  $H_0$  ditolak. Artinya bahwa variabel infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB pada tingkat kepercayaan 95% ( $= 5\%$ ).

## 2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel dikatakan signifikan apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel atau nilai t-statistiknya lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.5 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Hasil uji t pada variabel infrastruktur dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%), diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.896287 dan signifikansi sebesar 0.0051 dengan koefisien regresi sebesar 0.063934. Dengan demikian nilai signifikansi t-hitung lebih kecil dari 0.05, hal ini menunjukkan bahwa variabel infrastruktur mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2011-2013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel infrastruktur berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Tengah terbukti.
2. Hasil uji t pada variabel kesehatan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%), diperoleh nilai t-hitung sebesar -2.048150 dan signifikansi sebesar 0.0445 dengan koefisien regresi sebesar -0.050239 dengan demikian nilai signifikansi t-hitung lebih kecil dari 0.05, hal ini menunjukkan bahwa variabel kesehatan berpengaruh signifikan

terhadap dan positif terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2011-2013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB Jawa Tengah terbukti..

3. Hasil uji t pada variabel pendidikan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), diperoleh nilai t-hitung sebesar -1.855383 dan signifikansi sebesar 0.0679 dengan koefisien regresi sebesar -0.025570 Dengan demikian nilai signifikansi t-hitung lebih besar dari 0.05, hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan tidak mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2011-2013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di DIY tidak terbukti.

### 3. Koefisien Determinasi

Tabel 4.8  
Uji R-Square

R-Square	0.995936
----------	----------

Sumber : data diolah (lampiran)

Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan koefisien determinasi sebesar 0.995936 atau 99%. Hal ini membuktikan bahwa sebesar 99% PDRB di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan sisanya ( $100\% - 99\% = 1\%$ ) dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian.

## **E. Pembahasan**

Berdasarkan hasil dari estimasi yang menggunakan *fixed effect model* dapat disimpulkan bahwa hasil regresi yang dihasilkan cukup baik untuk menjelaskan pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif.

### **1. Pengaruh Dana Pendidikan Terhadap PDRB**

Salah satu anggaran yang memiliki perhatian lebih oleh pemerintah adalah dana di bidang pendidikan. Tilaar (2002:67) menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya, menyimpulkan dari tulisan tilaar tersebut maka dalam hal ini pendidikan merupakan alat yang digunakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia.

Terkait dengan pendanaan bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan ketentuan bahwa alokasi dana untuk pendidikan minimal 20% dari APBD. Hal ini tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1): Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Beberapa pemerintah daerah di Jawa Tengah memang sudah mengalokasikan lebih dari 20% APBD-nya untuk pendidikan, namun masih ada kabupaten di Jawa Tengah yang belum menerapkan kebijakan ini. Ada kabupaten yang hanya mengalokasikan kurang dari 10% APBD-nya untuk pendidikan.

Todaro & Smith (2003:404) menyatakan bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. sehingga, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Mengingat pentingnya dana pendidikan dalam pembangunan katrakter dan SDM masyarakat Indonesia, maka tidak heran pemerintah sangat memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan.

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis variabel alokasi dana atas pendidikan tidak berpengaruh terhadap PDRB. Hal tersebut disebabkan pendidikan merupakan investasi jangka panjang, sementara itu penelitian ini hanya mengambil periode 3 tahun. Besar kemungkinan apabila penelitian dilakukan dalam periode tahun yang panjang dapat memungkinkan variabel ini dapat mempengaruhi PDRB.

Menurut teori human capital bahwa pengeluaran pemerintah atas pendidikan dapat meningkatkan kualitas penduduk kemudian selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian ini hasilnya berkebalikan dengan teori yaitu pengeluaran pemerintah atas pendidikan dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda juga hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Donald N dan Shuanglin (1993) bahwa pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah atas pendidikan bersifat seperti investasi yang tidak dapat langsung memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh Widodo (2010:76) dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah atas sektor publik dalam hal ini pendidikan, tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen. Variabel pengeluaran pemerintah harus berinteraksi dengan variabel lain. Periode penelitian yang hanya 3 tahun kemungkinan belum dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah atas pendidikan. Selain itu pengeluaran pemerintah atas pendidikan yang akan menghasilkan perbaikan di sektor pendidikan tidak dapat secara cepat mengubah kualitas angkatan kerja.

Penelitian yang dilakukan Bastias (2014) juga tidak menemukan tingkat signifikansi anatar anggaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun periode tahun yang diambil selama 41 tahun. Hasil tersebut bertentangan dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dengan dua penelitan tersebut maka memang dana pendidikan tidak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada kenyataanya di Jawa Tengah pengalokasian dana untuk pendidikan masih kurang dari 20 persen APBD yang ada. Padahal menurut UU no 20 tahun 2003 menetapkan untuk alokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Dalam hal ini tentunya diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan APBD yang ada sebagai anggaran untuk pendidikan. Sehingga tidak ada lagi anggaran yang pada kurang dari ketentuan pemerintah.

Salah satu penyebab kurang optimalnya dana pendidikan disebabkan oleh tingkat korupsi dana pendidikan yang tinggi di Jawa Tengah. Terhitung sejak tahun 2006 hingga 2015 setidaknya ada 42 kasus korupsi dana pendidikan yang terjadi di Jawa Tengah. Hal itu membuat Jawa Tengah ada di posisi teratas sebagai

provinsi dengan paling banyak kasus korupsi dana pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor tersebutlah yang dapat mempengaruhi efektifitas dana pendidikan yang diberikan pemerintah. Dengan anggaran yang tidak mencapai 20 persen dari APBD dan korupsi maka menyebabkan anggaran pendidikan di Jawa Tengah kurang optimal.

## **2. Pengaruh dana kesehatan terhadap PDRB**

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sebuah negara tersebut maju atau tidak adalah dengan tingkat angka harapan hidup yang tinggi serta rendahnya angka kematian kelahiran bayi, dalam hal ini yang menjadi patokan adalah seberapa besar pemerintah memiliki kesadaran atas kesehatan masyarakatnya.

Dana untuk kesehatan yang diatur pada UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, oleh karena itu sudah semestinya pemerintah harus dapat menyediakan pelayanan publik yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Beberapa ekonom menganggap bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi, baik jika dinilai dari stok maupun sebagai investasi. Sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh karena itu kesehatan

dianggap sebagai modal dan memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu maupun untuk masyarakat.

Pada hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa dana pemerintah pada sektor kesehatan berdampak terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Jawa Tengah. Variabel dana pemerintah atas kesehatan berpengaruh terhadap PDRB dikarenakan anggaran ini langsung memberikan hal yang riil, seperti jaminan kesehatan, pemberian sarana dan prasarana kesehatan dan sebagainya. Maka hal ini mempengaruhi peningkatan sektor kesehatan terhadap tingkat produktifitas yang ada di tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Signifikannya anggaran atas kesehatan di Jawa Tengah terhadap pertumbuhan PDRB tak lepas dari baiknya pengelolaan anggaran dana kesehatan oleh pemerintah Jawa Tengah. Hal tersebut dibuktikan oleh pemberian penghargaan Jawa Tengah sebagai daerah paling baik kinerja pengelolaan dana alokasi kesehatan dari kementerian kesehatan Republik Indonesia. Jawa Tengah dianggap baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dana alokasi kesehatan.

Tabel 4.9

## Proporsi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2009-2013

## 3. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD

Tabel 2.10 : Proporsi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2009 - 2013

NO	TAHUN	APBD (,000)		
		Provinsi	Dinas Kesehatan	%
1	2009	5.692.612.376	130.622.314	2,29%
2	2010	6.263.446.469	139.477.000	2,22%
3	2011	8.024.966.580	111.216.000	1,38%
4	2012	11.928.572.886	156.220.000	1,31%
5	2013	13.684.684.479	188.737.680	1,38%

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2013

Anggaran Dinas Kesehatan bersumber APBD Provinsi, pada tahun 2009 – 2013 fluktuatif cenderung mengalami peningkatan. Namun apabila dilihat proporsi anggaran Dinas Kesehatan terhadap anggaran Provinsi selama 5 tahun mengalami penurunan.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Dinas Kesehatan tahun 2009 – 2013, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :

II - 27

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2013

Dari tabel di atas, anggaran dinas kesehatan bersumber APBD Provinsi, pada tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi baik dalam jumlah maupun persentasenya terhadap APBD Jawa Tengah. Tapi pada tahun akhir cenderung mengalami peningkatan. Meskipun persentase anggaran dana untuk kesehatan kecil tetapi dengan pengelolaan dan pelaksanaan yang baik anggaran kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB Jawa Tengah.

### 3. Pengaruh dana infrastruktur terhadap PDRB

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Hirschman (1958) mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi. Todaro (2006:16) juga mendefinisikan infrastruktur sebagai

salah satu faktor penting yang menentukan pembangunan ekonomi.

Dalam pembahasannya infrastruktur dapat dikatakan memiliki sifat sebagai barang publik. Barang publik mempunyai dua ciri utama dari sisi penggunaannya (konsumsi barang publik) yaitu *non-rivalry* dan *non-excludable*. *Rivalry* merupakan sifat rivalitas atau persaingan dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang. Maksudnya adalah jika suatu barang digunakan oleh seseorang (pengguna), barang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain (pengguna).

Jika seseorang mengkonsumsi atau menggunakan satu barang dan tidak terjadi persaingan dengan orang lain dalam mengkonsumsi barang tersebut sehingga tidak mempengaruhi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi barang tersebut, maka dapat disebut sebagai barang publik. *Excludable* merupakan sifat mengeluarkan atau menghalangi seseorang dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu barang. Artinya, keinginan seseorang (pengguna) dalam mengkonsumsi suatu barang dapat dihalangi dengan oleh pihak lain (pemasok).

Pada hasil olah data yang dilakukan menunjukkan bahwa dana infrastruktur berpengaruh terhadap PDRB kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Karena pada dasarnya infrastruktur merupakan dana yang akan memberikan pengaruh riil secara langsung yaitu dapat berupa barang maupun fasilitas publik, sebagai contoh dengan pembangunan infrastruktur berupa jalan raya maka industri yang bergerak dengan memanfaatkan jalan raya sebagai transportasi utama akan terbantu, dan hal itu akan membuat Jawa Tengah menjadi semakin produktif. Oleh karena itu mengapa pengaruh alokasi dana atas infrastruktur sangat mempengaruhi PDRB meskipun penelitian hanya 3 tahun.

Pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong peningkatan produktivitas berbagai faktor produksi serta menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Keberadaan infrastruktur yang terabaikan dapat mengakibatkan penurunan produktivitas berbagai faktor produksi sehingga mengganggu jalannya roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menuntut ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti jalur transportasi, pasokan listrik, dan air serta fasilitas telekomunikasi dengan jaringan yang lebih luas. Kegagalan dalam menyediakan kebutuhan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada perekonomian. Oleh karenanya, dengan keterbatasan sumber daya yang ada, pemerintah harus cermat menentukan alokasi investasi infrastruktur yang dibangun.

perekonomian Jawa Tengah yang disokong oleh 3 sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pertanian, meskipun cenderung meningkat namun faktanya masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional dan relatif lebih rendah dibanding propinsi lain di pulau Jawa. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel di bawah ini, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2006-2010 Propinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 5,50 %, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional (rata-rata 5,73%).

Mengingat kondisi geografis dan potensi sumber daya alam yang relatif sama dengan propinsi lain di pulau jawa, seharusnya Propinsi Jawa Tengah mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. letak Propinsi Jateng yang berada di tengah juga tentunya memiliki nilai strategis tersendiri dalam pembangunan perekonomian daerah.

Tabel 4.10

**Laju Pertumbuhan PDRB enam propinsi di pulau Jawa Tahun 2006 - 2010  
Atas Dasar Harga Konstan 2000**

No	Provinsi	Tahun					rata-rata 2006-2010
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	DKI Jakarta	5.95	6.44	6.23	5.02	6.51	6.03
2	Jawa Barat	6.02	6.48	6.21	4.19	6.09	5.80
<b>3</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>5.33</b>	<b>5.59</b>	<b>5.61</b>	<b>5.14</b>	<b>5.84</b>	<b>5.50</b>
4	DI. Yogyakarta	3.70	4.31	5.03	4.43	4.87	4.47
5	Jawa Timur	5.80	6.11	6.16	5.01	6.68	5.95
6	Banten	5.57	6.04	22.53	4.69	5.94	8.95
<b>7</b>	<b>nasional</b>	<b>5.50</b>	<b>6.35</b>	<b>6.01</b>	<b>4.63</b>	<b>6.20</b>	<b>5.73</b>

Sumber : BPS diolah.

Pentingnya peran infrastruktur di Jawa Tengah semakin nyata dengan ditetapkannya pulau jawa sebagai koridor industri dan jasa nasional dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang telah dicanangkan pemerintah pada 27 mei 2011 lalu. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan konomi Indonesia (MP3EI) disebutkan bahwa Koridor Ekonomi Jawa yang akan dikembangkan menjadi pendorong industri dan jasa nasional, memiliki beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain :

- Tingginya tingkat kesenjangan PDRB dan kesenjangan kesejahteraan di antara provinsi di dalam koridor;
- Pertumbuhan tidak merata sepanjang rantai nilai, kemajuan sektor manufaktur tidak diikuti kemajuan sektor-sektor yang lain;
- Kurangnya investasi domestik maupun asing;
- Kurang memadainya infrastruktur dasar.